

---

**MENDISKUSIKAN PENELITIAN-PENELITIAN TERDAHULU  
DENGAN TEMA “POLITIK UANG DI INDONESIA” DARI TAHUN  
1983-2023 BERDASARKAN PENCARIAN SCOPUS****Bunga Aprillia\* Yamardi**Universitas Jendral Ahmad Yani

---

**Abstract**

*Money politics in Indonesia is a phenomenon that often occurs in general elections at the central, regional and village levels. There are very few studies on money politics in the world, in a Scopus search from 1983-2023 there were only 50 documents discussing it. Among the 50 writers, there are dominated by writers from Indonesia who study money politics in Indonesia. This research is descriptive research using the literature study method. The literature study method is a series of activities related to methods of collecting library data, reading, and taking notes, and managing research materials. Based on Scopus search results, of the 50 documents only 7 (seven) documents are relevant to Indonesia's political conditions. This previous research document discusses the origins of money politics from the new order to money politics from a gender dan religiosity perspective. The results of the research state that money politics is about people's willingness to buy votes but normatively it does not determine the choice of political party that gives monetary gifts*

**Keywords:**

*Literature Study, Money politic, Scopus website*

**Abstrak**

Politik uang di Indonesia menjadi fenomena yang sering terjadi pada pemilihan umum baik tingkat pusat, daerah sampai desa. Sedikit sekali kajian mengenai politik uang di dunia, dalam pencarian scopus dari tahun 1983-2023 hanya terdapat 50 dokumen yang membahasnya. Diantara 50 penulis tersebut didominasi oleh penulis asal Indonesia dengan kajian politik uang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Berdasarkan hasil pencarian scopus, dari 50 dokumen hanya 7 (tujuh) dokumen yang relevan dengan kondisi politik Indonesia. Dokumen penelitian terdahulu ini membahas mulai dari asal usul politik uang mulai order baru hingga politik uang dalam sudut pandang gender dan religiusitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa politik uang ini tentang kesediaan masyarakat melakukan pembelian suara tetapi secara normatif tidak menentukan pilihan partai politik yang memberikan hadiah uang.

**Kata kunci:** Pencarian scopus, Politik uang, Studi literatur

**Article history:**

Submission October 23, 2023

Revision November 13, 2023

Accepted November 29, 2023

Published December 31, 2023

**\*Corresponding author**Email: Bunga.april@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Politik uang di Indonesia telah marak sejak bermula order baru pada tahun 1990. Pemilu 2014 merupakan puncak praktek politik uang dilakukan di Indonesia secara terang-terangan. Penamaan politik uang sebetulnya perlu didefinisikan ulang melalui konsep yang mirip yaitu patronase dan klientelisme. Patronase merupakan sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter, 1994). Sedangkan klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistic dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik (Hutchcroft, 2014). Dalam penelitian ini, istilah politik uang digunakan untuk memudahkan pemahaman pembaca bahwa politik uang merujuk pada pemberian uang dari calon politisi ke pemilih. Politik uang juga dekat dengan kekuasaan oligarki yang melebarkan jaring keluarga sebagai kekuatan dalam pemenangan pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015). Monopolistik dalam pemilihan elektoral menjadi konsep kekuasaan yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

Fenomena politik uang di Indonesia menarik untuk dikaji secara mendalam. Penelitian terdahulu mengenai fenomena politik uang di dunia menjadi basis untuk melihat sejauh mana kecenderungan dominasi dari fenomena ini. Penting untuk melihat kajian terdahulu untuk dapat melihat trend peminatan para penulis yang berasal dari bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Metode studi literatur yang digunakan merupakan studi literatur tradisional dengan menyajikan data peneliti terdahulu dan menghimpun hasil penelitiannya secara naratif.

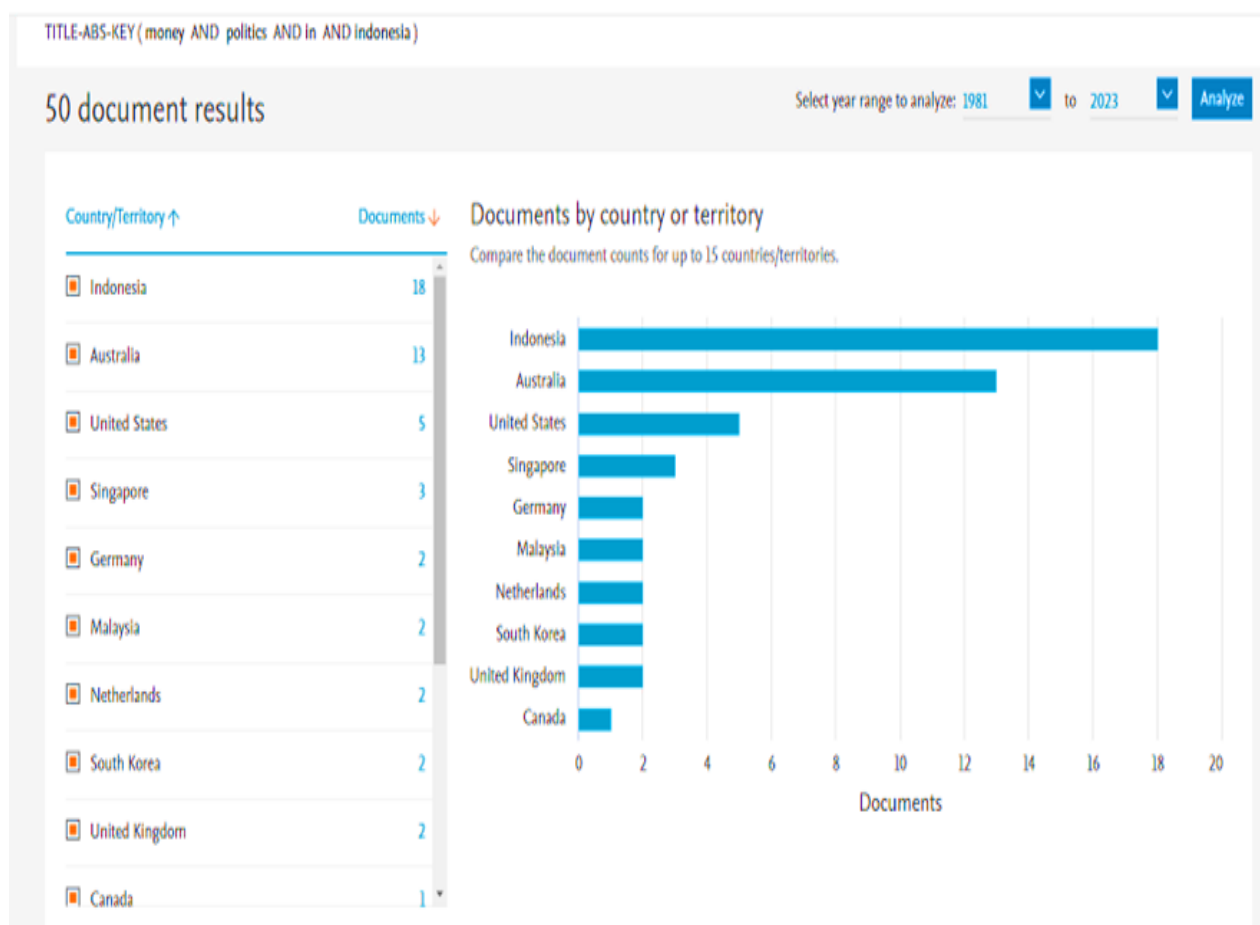
Metode pencarian menggunakan mesin pencarian data online melalui scopus menjadi basis untuk mencatatkan penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Tahun pencarian tidak dibatasi, sesuai dengan pencarian scopus penulis dokumen di dunia dari tahun 1983-2023. Hanya saja, hasil penelitian terdahulu yang termasuk dalam bidang politik yang sangat relevan dengan penelitian ini diambil dari tahun 2004-2020.

## HASIL DAN DISKUSI

### Penelitian Politik Uang di Indonesia melalui pencarian scopus

Berdasar pada Indeks Kerawanan Pemilu 2024 bahwa kejadian ataupun situasi yang mendorong adanya malpraktek dan manipulasi terhadap proses kepemiluan akan

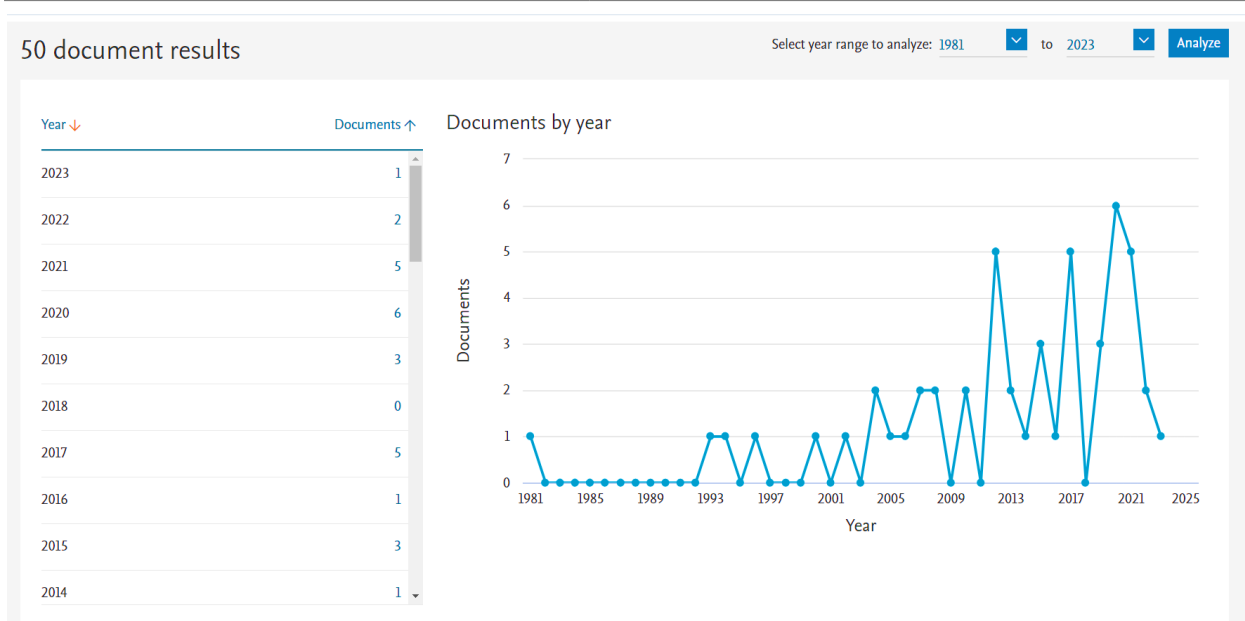
menjadi potensi kerawanan yang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Maka terdapat 4 (empat) dimensi yang dapat dipertimbangkan dalam melihat suatu daerah rawan atau tidak yaitu dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Peneliti fokus pada dimensi kontestasi dalam konteks politik uang. Penelitian terdahulu dalam pencarian scopus ditentukan melalui kata kunci *“money politics in Indonesia”*. Tanpa membatasi pencarian berdasarkan tahun (secara otomatis dilakukan pencarian dari tahun 1983-2023) hanya terdapat 50 dokumen dari seluruh penulis di dunia. Indonesia menempati urutan pertama dengan tema ini (Gambar 1).



**Gambar 1. Asal dokumen berdasarkan negara**

Sumber: Website Scopus (2023)

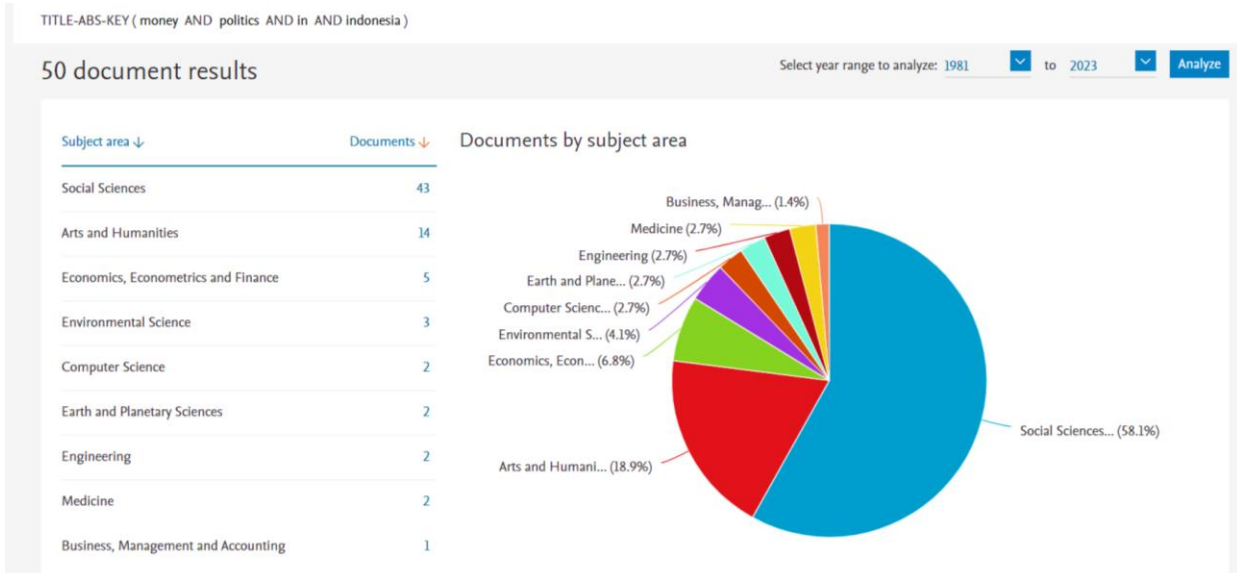
Berdasarkan Gambar 1, dokumen tersebut berasal dari para penulis yang berada di Indonesia, Australia, Amerika, Singapura, Jerman, Malaysia, Belanda, Korea Selatan, Inggris, dan Kanada. Diantara negara-negara tersebut penulis asal Indonesia menempati urutan pertama sebanyak 18 dokumen dari segala jenis bidang ilmu.



Gambar 2. Dokumen berdasarkan tahun publikasi

Sumber: Website Scopus (2023)

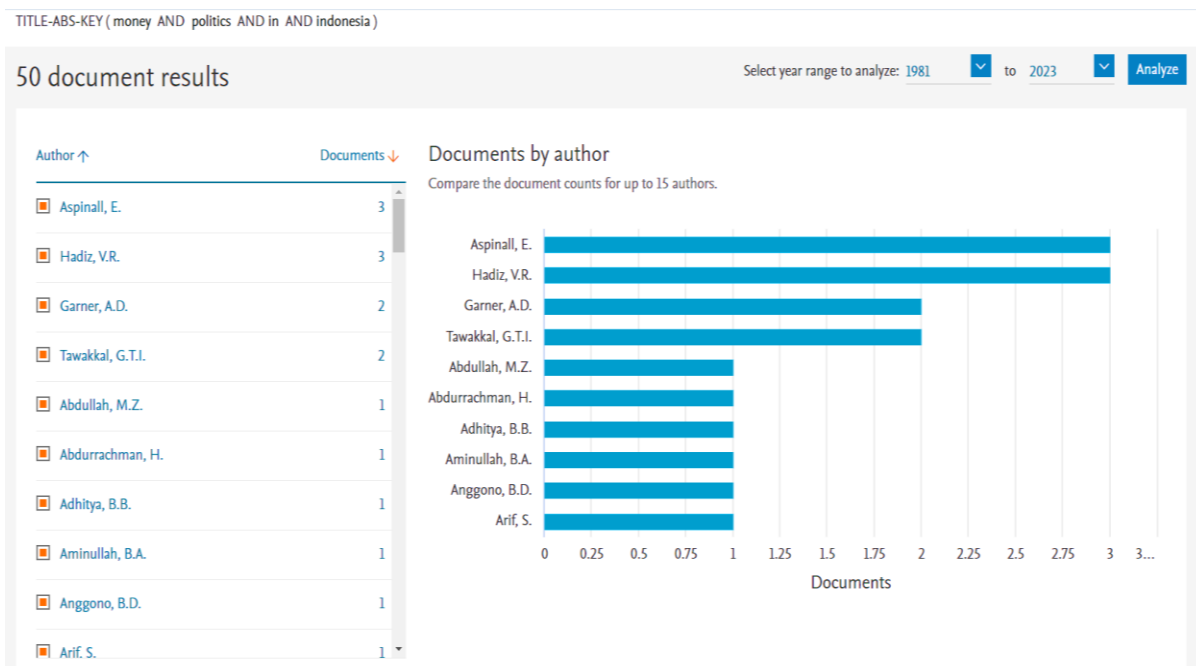
Berdasarkan Gambar 2 pencarian dokumen penelitian dengan tema politik uang di Indonesia tidak dibatasi, sesuai pencarian scopus dari tahun 1983 hingga 2023. Pada tahun 1983 hanya ada 1 dokumen yang membahasnya dalam bidang bisnis, manajemen dan akunting. Selanjutnya tahun 2021 merupakan tahun yang paling tinggi peminat mengenai tema tersebut, disinyalir lonjakan ini karena tahun politik pemilihan presiden di Indonesia.



Gambar 3. Dokumen berdasarkan bidang ilmu

Sumber: Website Scopus (2023)

Keseluruhan dokumen tentang politik uang di Indonesia bukan hanya dari bidang politik, tetapi dari berbagai bidang diantaranya bidang bisnis manajemen, kesehatan, teknik, bumi dan planet, ilmu komputer, ilmu lingkungan, ekonomi, seni dan kemanusiaan, dan ilmu sosial. Bidang ilmu sosial mendominasi hingga 58,1%.



Gambar 4. Dokumen berdasarkan nama penulis

Sumber: Website Scopus (2023)

Berdasarkan Gambar 4 terdapat 15 penulis yang fokus dengan tema politik uang di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) dokumen yang ditulis oleh Aspinall E. dan 3 (tiga) dokumen yang ditulis oleh Hadiz, V. R., didominasi oleh peneliti asal Indonesia. Berikut ini dokumen yang paling relevan untuk bahan bacaan mengenai politik uang di Indonesia dengan melibatkan 7 (tujuh) judul penelitian dalam Tabel 1.1:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu relevan dengan bidang politik

No	Sumber penelitian terdahulu	DOI
1	<b>Hadiz, V.R.</b> Indonesian local party politics: A site of resistance to neoliberal reform (2004) <i>Critical Asian Studies</i> , 36 (4), pp. 615-636. Cited 45 times.	<a href="https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-10344242023&amp;doi=10.1080%2f1467271042000273275&amp;partnerID=40&amp;md5=DOI:10.1080/1467271042000273275">https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-10344242023&amp;doi=10.1080%2f1467271042000273275&amp;partnerID=40&amp;md5=DOI:10.1080/1467271042000273275</a>
2	<b>Hadiz, V.R.</b> The localization of power in Southeast Asia (2007) <i>Democratization</i> , 14 (5), pp. 873-892. Cited 23 times.	<a href="https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36549013648&amp;doi=10.1080%2f13510340701635704&amp;partnerID=40&amp;md5=DOI:10.1080/13510340701635704">https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36549013648&amp;doi=10.1080%2f13510340701635704&amp;partnerID=40&amp;md5=DOI:10.1080/13510340701635704</a>

- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | <b>Hadiz, V.R.</b><br>Democracy and money politics: The case of Indonesia (2012) Routledge Handbook of Southeast Asian Politics, pp. 71-82. Cited 8 times.  | <a href="https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84875888284&amp;doi=10.4324%2f9780203155011-14&amp;partnerID=40&amp;md5=DOI:10.4324/9780203155011-14">https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84875888284&amp;doi=10.4324%2f9780203155011-14&amp;partnerID=40&amp;md5=DOI:10.4324/9780203155011-14</a>                           |
| 4 | <b>Tawakkal, G.T.I., Garner, A.D.</b><br>Unopposed but not uncontested: Brokers and “vote buying” in the 2017 Pati district election (2017) Contemporary Southeast Asia, 39 (3), pp. 491-510. Cited 3 times.                              | <a href="https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040905365&amp;doi=10.1355%2fcs39-3e&amp;partnerID=40&amp;md5=050009af357e9efabbaf22d61efb866c">https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040905365&amp;doi=10.1355%2fcs39-3e&amp;partnerID=40&amp;md5=050009af357e9efabbaf22d61efb866c</a><br>DOI: 10.1355/cs39-3e             |
| 5 | <b>Tawakkal, G.T.I., Suhardono, W., Garner, A.D., Seitz, T.</b><br>Consistency and vote buying: Income, education, and attitudes about vote buying in Indonesia (2017) Journal of East Asian Studies, 17 (3), pp. 313-329. Cited 4 times. | <a href="https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85037867283&amp;doi=10.1017%2fjea.2017.15&amp;partnerID=40&amp;md5=1f2514ee51cc8fc4c55d14081cab4b68">https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85037867283&amp;doi=10.1017%2fjea.2017.15&amp;partnerID=40&amp;md5=1f2514ee51cc8fc4c55d14081cab4b68</a><br>DOI: 10.1017/jea.2017.15 |
| 6 | <b>Abdurrahman, H., Majesty, N., Riyanti, R.</b><br>Women as the victim of politics: Experiences in the 2019 legislative elections in Indonesia (2020) International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11 (5), pp. 463-476.   | <a href="https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081718871&amp;partnerID=40&amp;md5=3aa15aebb11bce67034c342211c7f284">https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081718871&amp;partnerID=40&amp;md5=3aa15aebb11bce67034c342211c7f284</a>   |
| 7 | <b>Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., &amp; Warburton, E.</b><br>(2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. <i>Electoral Studies</i> , 63.  | <a href="https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111">https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111</a>   |
- 

Sumber: Hasil olahan peneliti (2023)

### **Diskusi-diskusi yang disajikan dalam penelitian terdahulu**

Hadiz, V.R., dalam penelitiannya menyebutkan bahwa reorganisasi kekuasaan sejak jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 memiliki pengaruh besar dalam penguatan bentuk demokrasi yang dijalankan dengan logika politik uang dan kekerasan. Masih membicarakan kekuasaan setelah orde baru runtuh (Hadiz, 2004). Kembali Hadiz, V.R. menekankan bahwa di Indonesia, terdapat koalisi kekuasaan predator lokal yang menerapkan politik uang dan mengembangkan aspirasi dan ambisi ekonomi dan politik yang lebih besar. Meskipun kebangkitan demokrasi elektoral berarti partisipasi politik menjadi lebih luas, kontestasi politik masih terbatas pada koalisi persaingan kepentingan di antara predator lokal (Hadiz, 2007). Penelitiannya yang ketiga dari Hadiz, V.R. dengan judul Demokrasi dan politik uang, euphoria demokrasi di Indonesia meledak karena selama orde baru Indonesia dalam kepemimpinan otoriter, kaku dan masyarakat sipil tidak diberi kebebasan. Politik uang menjadi permainan yang sangat populer bahkan menjadi cara yang efektif untuk melanggengkan kekuasaan (Hadiz, 2012).

Peneliti lainnya yang fokus dalam tema ini adalah Tawakkal, G.T.I., Suhardono, W., Garner, A.D., Seitz, T., dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kekuasaan jaringan

keluarga telah menutup persaingan politik elektoral, membangun kontrol terhadap pemilu kepala daerah dengan menciptakan jaringan politik yang monopolistik. Dalam praktik politik, kontrol politik keluarga sangat penting dalam memahami maraknya pemilihan calon tunggal (Tawakkal et al., 2017). Kemudian, ditegaskan kembali dalam penelitian yang kedua Tawakkal, G.T.I., Garner, A.D., bahwa sikap masyarakat Indonesia dalam merespon pembelian suara dan kesediaan mereka untuk menerima hadiah dari para kandidat menjadi faktor utama. Terutama masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung menerima uang namun tidak mempengaruhi sikap normatif mengenai pembelian suara. Disisi lain pendidikan memiliki dampak yang lebih luas dengan mempengaruhi sikap normatif dan kemauan menerima uang (Tawakkal & Garner, 2017).

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, Abdurrachman, H., Majesty, N., Riyanti, R., dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam tiga pemilu terakhir, belum terjadi perbaikan internal partai yang signifikan, terhadap dukungan politisi perempuan dan perbaikan secara keseluruhan, pada budaya politik Indonesia yang masih dikuasai oleh politik uang, politik kekerabatan, dan politik nomor urut (Abdurrachman et al., 2020). Menurut hasil pencarian di website scopus hanya 1 (satu) yang membahas politik uang di Indonesia dengan pendekatan gender.

Penelitian ini berhubungan agama dan ideologi pemilih dengan partai politik. Dalam penelitian Aspinall yang menyatakan bahwa terdapat tingkat kesesuaian yang tinggi antara pasangan partai antara pemilih dan politis dalam hal ideologis dan agama sebagai sifat religius suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, jaringan klientelistik dapat berperan penting dalam menjamin kelangsungan perpecahan ideologi berbasis agama selama puluhan tahun otoritarianisme dan politik demokratis yang ditandai dengan moderasi ideologis. Perbedaan antar partai mencapai 38,8% dari total keragaman dalam Pancasila dan 24,7% dalam Islam, namun hanya sebesar 3,2% dalam statisme dan 0,8% dalam perekonomian. Terdapat kecenderungan tingginya diferensiasi partai dalam isu-isu agama dan rendahnya diferensiasi, jika ada, dalam isu-isu ekonomi (Fossati et al., 2020).

## **SIMPULAN**

Diskusi penelitian terdahulu cukup menarik beberapa melihat politik uang di Indonesia dimulai karena pengaruh reorganisasi kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, kemudian desentralisasi mengantarkan politik uang semakin lancar dan masif karena predator lokal. Penelitian selanjutnya mulai meneliti dari sisi aspek perilaku masyarakat dalam penerimaan hadiah dari partai politik yang bersaing. Tidak dipungkiri kontestasi politik dengan politik uang terjadi bukan hanya pada saat pemilu Presiden tetapi pemilu kepala daerah dan pemilu kepala desa. Kemudian dengan sudut pandang gender,

ternyata politik uang tidak bergantung kepada calon yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Politik uang, politik kekerabatan, dan politik nomor urut menjadi aspek budaya politik di Indonesia baik dilakukan oleh politisi laki-laki maupun perempuan.

## REFERENSI

- Abdurrachman, H., Majesty, N., & Riyanti, R. (2020). Women as the victim of politics: Experiences in the 2019 legislative elections in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(5), 463–476.
- Aspinall, Edward., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014* (1st ed., Vol. 1). PolGov.
- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111>
- Hadiz, V. R. (2004). Indonesian local party politics: A site of resistance to neoliberal reform. *Critical Asian Studies*, 36(4), 615–636. <https://doi.org/10.1080/1467271042000273275>
- Hadiz, V. R. (2007). The localization of power in Southeast Asia. *Democratization*, 14(5), 873–892. <https://doi.org/10.1080/13510340701635704>
- Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. (2017). Unopposed but not uncontested: Brokers and “vote buying” in the 2017 Pati district election. *Contemporary Southeast Asia*, 39(3), 491–510. <https://doi.org/10.1355/cs39-3e>
- Tawakkal, G. T. I., Suhardono, W., Garner, A. D., & Seitz, T. (2017). Consistency and vote buying: Income, education, and attitudes about vote buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 17(3), 313–329. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.15>